



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : HK.01.00/Kep.16/PIMP.DPRD /2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa program pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagai pedoman pengendali penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa mekanisme pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan dalam sebuah program dengan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah mengenai hasil penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah diperlukan penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 46);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Majalengka Nomor : HK.00.01/2490/Hukum Tanggal 21 November 2022 Perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK.00.01/ 1401 / DPRD TANGGAL 22 November 2022 Perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 Inisiatif DPRD

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan 12 (Dua Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 Nopember 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

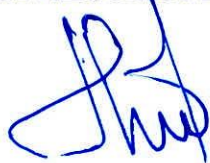
KABUPATEN MAJALENGKA,

KETUA DPRD



EDY ANAS DJUNAEDI

WAKIL KETUA DPRD



DIDIN JAENUDIN

WAKIL KETUA DPRD



ASEP EKA MULYANA

WAKIL KETUA DPRD



DHORA DAROJATIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR : HK.01.00/Kep.16-Pimp.DPRD /2022
 TANGGAL : 28 November 2022
 TENTANG : **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN 2023**

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTAN SI TERKAI T	TARG ET PENY AM- PAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJE- LASAN/ KETE- RANGAN			
1.	Peraturan Daerah	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Mengatur mengenai laporan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022	√		a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2023	Inisiatif Pemerintah Daerah yang akan dibahas pada Triwulan

						<p>dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>					
2.	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		√		<p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>		√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2023	Inisiatif Pemerintah Daerah yang akan dibahas pada Triwulan IV

3.	Peraturan Daerah	Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha	√	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	√		Tahun 2023	Inisiatif Pemerintah Daerah yang akan dibahas pada Triwulan IV
4.	Peraturan Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur mengenai: a. restrukturisasi jenis pajak daerah b. rasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan c. penyesuaian tarif d. muatan lokal	√	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	√		Tahun 2023	Inisiatif Pemerintah Daerah yang akan dibahas pada Triwulan I
5.	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Mengatur mengenai rencana pendapatan dan belanja anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah	√	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2023	Inisiatif Pemerintah Daerah yang akan dibahas

			Daerah Tahun Anggaran 2024			<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>					pada Triwulan IV
6.	Peraturan Daerah	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Mengatur mengenai Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	√		Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060)	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibahas

											pada Triwulan II
7.	Peraturan Daerah	Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome	Mengatur mengenai Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	√		a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibahas pada Triwulan II
8.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Mengatur mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	√		a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibahas pada Triwulan IV.
9.	Peraturan Daerah	Bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu	Mengatur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat	√		a. Undang-undang No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan

			tidak mampu			menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.					an Rakyat Daerah yang akan dibahas pada Triwulan III
10.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Mengatur mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	√		a. Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan b. Peraturan pemerintah No. 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibahas pada Triwulan IV
11.	Peraturan Daerah	Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	√		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dibahas pada Triwulan IV
12.	Peraturan Daerah	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	√		a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian	√			Tahun 2023	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

						Pangan Berkelanjutan					yang akan dibahas pada Triwulan III
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-------------------------------------

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

KETUA DPRD



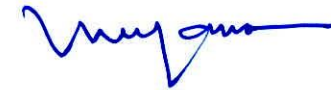
EDY ANAS DJUNAEDI

WAKIL KETUA DPRD



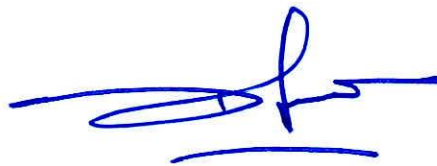
DIDIN JAENUDIN

WAKIL KETUA DPRD



ASEP EKA MULYANA

WAKIL KETUA DPRD



DHORA DAROJATIN